

## **Peningkatan Perekonomian Masyarakat Masih Jadi Prioritas Pembangunan Hingga 2026**

PURBALINGGA – Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat berbasis pengembangan sumberdaya lokal, serta didukung peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang memadai, menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga pada 2022. Prioritas tersebut tercantum dalam Rencana Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) Tahun 2021-2026.

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, menyebutkan, terdapat lima prioritas pembangunan daerah dan kinerja pemerintahan dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026. Dokumen Ranwal RPJMD tersebut nantinya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya, konsep tersebut akan disetujui bersama sebagai dasar pelaksanaan RPJMD ke depan. “Tahun kedua RPJMD (tahun 2023) diarahkan untuk pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, yang didukung peningkatan infrastruktur dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” papar Bupati Tiwe saat memaparkan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026 di ruang rapat DRRD Purbalingga, Senin (19/4).

Pembangunan pada tahun ketiga dalam RPJMD, yakni 2024 diarahkan pada peningkatan kualitas manusia dan kesejahteraan masyarakat, yang didukung penguatan perekonomian daerah serta penguatan penyelenggaraan pemerintahan dan desa. Tahun keempat, prioritas pembangunan adalah peningkatan kualitas manusia dan kesejahteraan masyarakat, dengan didukung oleh peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perdesaan berbasis pengembangan ekonomi lokal. “Tahun kelima RPJMD diarahkan pada penguatan daya saing dan kemandirian daerah melalui peningkatan kualitas manusia dan penguatan perekonomian daerah, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Tiwi.

Menurutnya, pembangunan daerah selama lima tahun ke depan dibatasi oleh banyak hal, baik ketersediaan sumber-sumber pembiayaan maupun keterbatasan sumberdaya pembangunan lainnya. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintahan harus menyiapkan pelbagai inovasi, pilihan strategi, dan arah kebijakan yang tepat, dengan tetap mengedepankan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pengarusutamaan gender, transformasi digital, serta memperhatikan modal sosial budaya di dalam masyarakat dan perwujudan pengelolaan pemerintahan yang baik. “Namun demikian, kami yakin bahwa dalam lima tahun ke depan Kabupaten Purbalingga memiliki momentum yang baik untuk meraih pertumbuhan perekonomian yang baik, antara lain dengan semakin terbukanya akses wilayah Purbalingga dengan beroperasinya Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman, yang tentu saja harus diiringi dengan pilihan yang tepat dalam pengambilan kebijakan dan prioritas pembangunan,” katanya.

Selain menyerahkan Ranwal RPJMD 2021 – 2026, Bupati Tiwi juga menerima Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2020. Tiwi menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi tersebut bersama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di semua tingkatan dan bidang tugas, termasuk jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purbalingga. “Rekomendasi DPRD ini akan menjadi bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depannya,” katanya.

**Sumber :**

[jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id), Selasa, 20 April 2021

**Catatan :**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

- Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman bagi:

a. PD dalam menyusun Renstra-PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2018-2023;

b. Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.

- BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambar 2.24. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018

Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sebagai berikut:

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 diatas provinsi dan nasional, sebanyak 11 kabupaten meliputi Kabupaten Brebes, Wonosobo, Pemalang, Rembang, Purbalingga, Banyumas, Kebumen, Sragen, Demak, Banjarnegara, dan Cilacap;

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 dibawah provinsi dan diatas nasional, sebanyak 3 kabupaten Kendal, Klaten, dan Wonogiri;

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 21 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Karanganyar, Purworejo, Grobogan, Blora, Magelang, Semarang, Kota Surakarta, Tegal, Pekalongan, Pati, Temanggung, Boyolali, Kota Tegal, Batang, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Sukoharjo, Kudus, Jepara, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

- BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambar 2.26. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 (Maret)

Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 (Maret) sebagai berikut:

1. Indeks Keparahan Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di atas provinsi dan nasional, sebanyak 10 kabupaten meliputi Kabupaten Brebes, Pemalang, Wonosobo, Rembang, Purbalingga, Banyumas, Sragen, Kebumen, Demak, dan Kendal;

2. Indeks Keparahan Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di bawah provinsi dan diatas nasional, sebanyak 4 kabupaten meliputi Banjarnegara, Semarang, Tegal, dan Cilacap;

3. Indeks Keparahan Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 21 kabupaten/kota RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 |II - 40 meliputi Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Blora, Purworejo, Grobogan, Kota Surakarta, Magelang, Pekalongan, Kota Tegal, Temanggung, Pati, Boyolali, Batang, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kudus, Sukoharjo, Jepara, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

- BAB VII Arah Pengembangan Wilayah Jawa Tengah

Tabel 7.38 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Barlingmascakeb Tahun 2018-2023, Konsep Pengembangan Wilayah Barlingmascakeb Berbasis Agropolitan, Industri, dan Pariwisata berlandaskan Pilar Pembangunan Berkelanjutan

- Kebijakan Pengoptimalan pelayanan infrastruktur guna mendukung pengembangan sektor potensial di wilayah Barlingmascakeb. Indikasi Program Pengembangan Perhubungan Udara (Fasilitas) :

Fasilitasi Pembangunan Bandara Jenderal Besar Sudirman Purbalingga dan Pengembangan Bandara Tunggul Wulung Cilacap)

- Kebijakan Peningkatan pelayanan sosial wilayah Barlingmascakeb guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikasi Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah; Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif; Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda :

Pengembangan wirausaha baru berbasis potensi keunggulan dan fasilitasi pemasaran hasil produksi di Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap dan Kebumen

- Kebijakan Peningkatan peran kelembagaan dalam pengembangan wilayah Barlingmascakeb. Indikasi Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah; Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah; Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025

- Pasal 3

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh)

tahun kedepan terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi, arah dan tahapan pembangunan.

- Pasal 5 ayat (1)  
RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati.
- Pasal 5 ayat (2)  
Penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- Pasal 5 ayat (3)  
RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Kesimpulan :**

Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat berbasis pengembangan sumberdaya lokal, serta didukung peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang memadai, menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga pada 2022. Prioritas tersebut tercantum dalam Rencana Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) Tahun 2021-2026. Hal ini telah sesuai dengan Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Barlingmascakeb Tahun 2018-2023 dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Mengingat dalam penyusunan RJPMD 2021 - 2026, Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025.

Sebagai perwujudan dari Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Barlingmascakeb dalam RJPMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, terkait Pembangunan Bandara Jenderal Besar Sudirman Purbalingga yang saat ini telah terealisasi dan beroperasi melahirkan dasar optimisme Pemerintah Kabupaten Purbalingga, bahwa Kabupaten Purbalingga akan memiliki momentum yang baik untuk meraih pertumbuhan perekonomian yang baik dalam lima tahun ke depan.